

**SISTEM PEMOTONGAN GAJI SEBAGAI JASA BAGI
PENYALUR TENAGA KERJA RUMAH TANGGA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pada Yayasan Tunas Karya Unit 1
Di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar
Kabupaten Waykanan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Diseminarkan Dalam Memenuhi Tugas Dan
Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah

Oleh :

**FEDRI
NPM 1721030209**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2021 M**

**SISTEM PEMOTONGAN GAJI SEBAGAI JASA BAGI
PENYALUR TENAGA KERJA RUMAH TANGGA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pada Yayasan Tunas Karya Unit 1
Di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar
Kabupaten Waykanan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Diseminarkan Dalam Memenuhi Tugas Dan
Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah



Pembimbing I : Drs. Hj.Nurnazi, S.H., S.Ag., M.H.
Pembimbing II: Sucipto, S.Ag., M.Ag.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2021 M**

ABSTRAK

Manusia sebagai makhluk sosial harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Baik dalam perkara yang bersifat *duniawai* ataupun *ukhrowi* sebab semua aktivitas akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat. Dalam melaksanakan kehidupan, Islam selain mensyari'atkan akidah dan ibadah yang benar sebagai alat penghubung antara hamba dan penciptanya juga merumuskan tata cara yang baik dan benar dalam muamalah sebagai penghubung antara manusia satu sama lain. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Sistem Pemotongan Upah pekerja rumah tangga Pada Penyalur Tenaga Kerja di Yayasan Tunas Karya Unit 1 Desa Tegal Mukti Kecamatan Negri Besar Kabupaten Waykanan? Bagaimana Perspektif Hukum Islam Tentang Pemotongan Upah pekerja rumah tangga pada Yayasan Tunas Karya Unit 1 di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negri Besar Kabupaten Waykanan? Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Sistem Pemotongan Upah pekerja rumah tangga Pada Penyalur Tenaga Kerja di Yayasan Tunas Karya Unit 1 Desa Tegal Mukti Kecamatan Negri Besar Kabupaten Waykanan, serta Untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam Tentang Pemotongan Upah pekerja rumah tangga pada Yayasan Tunas Karya Unit 1 Desa Tegal Mukti Kecamatan Negri Besar Kabupaten Waykanan. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang bersifat deskriptif *analisis*, dengan analisis sumber data yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara kepada pengelola lahan tersebut serta masyarakat di lingkungan sekitar lahan tersebut, data sekunder yang diperoleh dari buku-buku yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini ialah para calon PRT dan Pekerja Rumah Tangga yang memakai jasa , masyarakat, dan pejabat yang berwenang di Desa Mulya Asri. Analisis dengan melakukan analisis *kualitatif* dengan menggunakan metode cara berfikir *induktif*. Berdasarkan hasil analisis dari penelitian dapat ditarik kesimpulan yaitu Pemotongan Upah Pekerja Rumah Tangga Pada Penyalur Tenaga Kerja Di Yayasan Tunas Karya Unit 1 Desa Tegal Mukti

Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Waykanan dalam prakteknya pemotongan upah oleh pihak yayasan didasari atas perjanjian kerja yang mana sudah disepakati sebelum nya oleh para calon pramuwisma dan ditanda tangani secara sukarela, di dalamnya memuat tentang hubungan antara pramuwisma dengan pihak yayasan dan pengguna jasa mengenai tatacara kerja, upah, hak dan kewajiban serta aturan-aturan lain yang berlaku di yayasan tenaga kerja tersebut. Adapun diantaranya salah satunya ialah tidak diberikannya upah selama 3 bulan awal bekerja dan akan dirapel di bulan berikutnya kemudian langsung akan dipotong untuk biaya administrasi Yayasan berupa akomodasi, makan, dan sebagainya. Berdasarkan hal tersebut pramuswisma tidak merasa keberatan pada aturan yang sudah diterapkan tersebut. Kemudian, Perspektif Hukum Islam Tentang Pemotongan Upah Pekerja Rumah Tangga Pada Yayasan Tunas Karya Unit 1 Desa Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Waykanan di lihat dari praktek nya mengenai pemotongan gaji selama 3 bulan dari pihak yayasan untuk biaya administrasi boleh diberlakukan karena dalam aturan itu lebih banyak maslahat (manfaatnya) dari pada mudharatnya dan hukum asal dari persyaratan-persyaratan yang telah disepakati. Adapun setelah dianalisis praktek tersebut dalam pandangan hukum Islam sudah memenuhi Akad, dan Asas-Asas perjanjian menurut hukum Islam. Serta tidak ada hal-hal yang melanggar aturan dalam hukum Islam maupun Undang-Undang yang berlaku.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FEDRI
NPM : 1721030209
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“SISTEM PEMOTONGAN GAJI SEBAGAI JASA BAGI PENYALUR TENAGA KERJA RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pada Yayasan Tunas Karya Unit 1 Di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada menyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 14 Agustus 2021

Penulis



Fedri

NPM. 1721030209



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarama I Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : “Sistem Pemotongan Gaji Sebagai Jasa Bagi
Penyalur Tenaga Kerja Rumah Tangga Dalam
Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada
Yayasan Tunas Karya Unit 1 Di Desa Tegal Mukti
Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way
Kanan)”

Nama : Fedri
Npm : 1721030209
Jurusan : Muamalah
Fakultaa : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan di pertahankan dalam sidang munaqosah
Fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

NIP. 197111061998032005

Sucipto, S.Ag., M.Ag.

NIP. 196612271995031001

Mengetahui

Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Sistem Pemotongan Gaji Sebagai Jasa Bagi Penyalur Tenaga Kerja Rumah Tangga Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Yayasan Tunas Karya Unit 1 Di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)”** Disusun oleh: **Fedri NPM: 1721030209**, Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....)

Sekretaris : Abuzar Alghifari, S. Ud., M.Ag. (.....)

Penguji Utama : Dr. Iskandar Syukur, M.A. (.....)

Penguji Pendamping I : Dr. Hj.Nurnazli,S.H.,S.Ag.,M.H. (.....)

Penguji Pendamping II : Sucipto, S.Ag., M.Ag. (.....)

Mengetahui,
Dean Fakultas Syariah



Dr. H. Khairuddin M.H.
NIP. 1962110221993031002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
(An-Nisa (4): ayat 29).*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, penuh cinta kasihnya yang telah memberikan saya kekuatan, dan telah menuntun dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ayahku Rohimin, Bapak Alim dan Ibuku tercinta Diana, terima kasih yang tak terhingga ayah, ibu atas do'a, semangat, dukungan, kesabaran, nasihat dan kasih sayang yang kalian berikan, semoga Allah selalu memberikan nikmat-Nya, kepada ayah dan ibu.
2. Neneku Hanim dan keluarga besar terima kasih yang tak terhingga atas do'a, dukungan, nasihat dan kasih sayang kalian berikan, semoga allah selalu memberikan nikmat-Nya, kepada kakek dan keluarga
3. Terima kasih kepada Nisya Pertiwi, Heny, Hety, Fauzan. yang juga memberi dukungan kepadaku.
4. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang sangat saya banggakan, akan selalu saya jaga nama baiknya.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Fedri. Putri Pertama dari Bapak Rohimin dan Ibu Diana. Saya dilahirkan pada tanggal 21 Desember 1996 di Desa Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat. Adapun pendidikan yang telah dicapai adalah sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Tulang Bawang Barat selesai pada tahun 2011.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Negeri Besar Kabupaten Waykanan selesai pada tahun 2014.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2017.
4. Selanjutnya pada tahun 2017 mengikuti pendidikan program Strata satu (S1) pada Fakultas Sya'riah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 18 Agustus 2021



KATA PENGANTAR

Bismilla hirohmanirrohim

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T yang telah mencurahkan karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini, sebagai persyaratan ujian munaqasah guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W sebagai pemimpin risyalah untuk menyelamatkan kehidupan umat manusia baik dunia maupun akhirat. Skripsi ini berjudul : **SISTEM PEMOTONGAN GAJI SEBAGAI JASA BAGI PENYALUR TENAGA KERJA RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pada Yayasan Tunas Karya Unit 1 Di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)**” dapat diselesaikan.

Adapaun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program sarjana, guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S1) jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Sya'riah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Selanjutnya untuk keberhasilan itu penulis tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M.Ag, selaku Rektor Uin Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini;
2. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H., selaku Dekan Fakultas Sya'riah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa dan mahasiswi;
3. Bapak Khoirudin, M.S.I dan Ibu Juhratul Khulwah, M.S.I. selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung;
4. Ibu Drs. Hj.Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Sucipto, S.Ag.,M.Ag.. selaku pembimbing II yang telah

banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

5. Dosen-dosen Fakultas Sya'riah dan segenap Tenaga Kependidikan UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala keputakaan UIN Raden Intan Lampung dan pemelihara kambing perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain;
7. Terimakasih atas segala dukungan, motivasi, serta semangat dan perhatian yang sangat luar biasa yang kalian berikan kepada penulis;

Bandar Lampung, 18 Agustus2021



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Identifikasi Masalah.....	6
D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	6
E. Rumusan Masalah	7
F. Tujuan Penelitian	7
G. Manfaat Penelitian.....	7
H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
I. Metode Penelitian	11
J. Sistematika Penulisan	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad Menurut Hukum Islam	19
1. Pengertian Akad.....	19
2. Dasar Hukum Akad.....	21
3. Rukun dan Syarat Akad	22
4. Macam-Macam Akad.....	26
5. Ketentuan Dalam Akad.....	28
B. Pengupahan Dalam Hukum Islam.....	30
1. Pengertian Upah	30
2. Dasar Hukum Upah	36
3. Rukun dan Syarat Upah.....	40

4. Macam-Macam Upah	45
5. Sistem Pembayaran Upah.....	47
6. Pelaksanaan Upah.....	48
7. Berakhirnya Upah.....	52
C. Asas-Asas Perjanjian Menurut Islam	53
D. Ketentuan Upah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	59

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Yayasan Tunas Karya Unit 1.....	67
1. Sejarah Singkat Yayasan Tunas Karya Unit 1	67
2. Struktur Organisasi Yayasan Tunas Karya Unit 1	68
3. Visi dan Misi Yayasan Tunas Karya Unit 1.....	68
4. Perjanjian Kerja YTKI dan Yayasan Tunas Karya Unit 1	69
B. Pelaksanaan Pemotongan Upah di Yayasan Tunas Karya Unit 1.....	78

BAB IV ANALISIS DATA

A. Sistem Pemotongan Upah Pekerja Rumah Tangga Pada Penyalur Tenaga Kerja di Yayasan Tunas Karya Unit 1 Desa Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan	83
B. Perspektif Hukum Islam Tentang Pemotongan Upah Pekerja Rumah Tangga Pada Penyalur Tenaga Kerja di Yayasan Tunas Karya Unit 1 Desa Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum peneliti membahas lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu penulis akan menjelaskan judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini. Penelitian yang dilakukan adalah berjudul: “**Sistem Pemotongan Upah Sebagai Jasa Penyalur Tenaga Kerja Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Yayasan Tunas Karya Unit 1 Desa Tegal Mukti Kecamatan Negri Besar Kabupaten Way Kanan)**”.

1. **Sistem** adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.¹
2. **Pemotongan upah** adalah dengan memotong upah gaji pekerja yang akan diterima pekerja yang mana upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja termasuk tunjangan, baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya²
3. **Penyalur** adalah lembaga-lembaga yang memasarkan produk berupa barang atau jasa dari produsen sampai ke konsumen.³
4. **Tenaga kerja** adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 14-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu Negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada

¹Mulyadi, *Sistem Informasi Akutansi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), h.5

²F.Winarni dan G.Sugiyarso, *Administrasi Gaji dan Upah*, (Yogyakarta:Pustaka Widyatama, 2006), h. 17

³Sofian Assuri, *Manajemen Pemasaran Dasar Konsep Dan Strategi*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1987), h. 242.

permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.⁴

5. **Perspektif** adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar dan tingginya) atau sudut pandang.⁵
6. **Hukum Islam** adalah “hukum-hukum Allah SWT. Yang kewajibannya telah diatur secara jelas dan tegas didalam Al-Quran atau hukum-hukum yang diterapkan secara langsung oleh wahyu, misalnya: kewajiban sholat, zakat, puasa, haji, sedangkan permasalahan yang belum jelas di dalam AL-Quran perlu penafsiran untuk menentukan hukum baru dari permasalahan menentukan hukum baru dari permasalahan tersebut yang dinamakan dengan istilah fiqh.”⁶

Berdasarkan penjabaran dari masing-masing istilah yang dimaksud dari judul di atas sesuatu peristiwa dari suatu tahapan-tahapan yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan skema dari suatu jasa yang di tawarkan oleh penyalur jasa, dan menurut perspektif hukum Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai mahluk sosial harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Baik dalam perkara yang bersifat *duniawai* ataupun *ukhrowi* sebab semua aktivitas akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, hubungan hak dan kewajiban diatur dengan kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya bentrok antar berbagai kepentingan, kaidah hukum

⁴ Mulyadi Subri, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003). h. 57

⁵ Al-faruz rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid II, (jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1989), h.361

⁶ Siti Mahmudah, *Historisitas Syariah (Kritik Relasi Khalid Abd al-Karim)* (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2016), h. 197.

yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum *mu'amalah*.⁷

Dalam melaksanakan kehidupan, Islam selain mensyari'atkan akidah dan ibadah yang benar sebagai alat penghubung antara hamba dan penciptanya juga merumuskan tata cara yang baik dan benar dalam muamalah sebagai penghubung antara manusia satu sama lain. Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.⁸

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa kehidupan manusia khususnya umat Islam dalam melakukan interaksi sosial sehari-hari harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila muamalah dilakukan oleh manusia dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang ada, maka semua manusia akan dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing.

Salah satu bentuk hukum *mu'amalah* yang sering terjadi adalah kerjasama antar sesama manusia, di satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang lazim disebut buruh atau bekerja dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan yang lazim pula disebut majikan.

Sistem pengupahan dalam perspektif hukum Islam di sebut dengan *Ijarah*. Adapun hukum *Ijarah* yang menjelaskan tentang pemotongan sesuai dengan akad yang ada yaitu:⁹

1. Antara kedua belah pihak diperlukan perjanjian yang adil
2. Bentuk upah *ijarah* waktu, jumlah upah dan sifat-sifatnya harus jelas
3. Memiliki manfaat dan tidak memiliki larangan agama terhadap pekerjaan tersebut

⁷ Rahmat Syafe'I, *Asas-Asas hukum Muamalat*, edisi revisi, (Yogyakarta: UII press, 2000), h. 7

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.118

⁹Husein Bahresy, *Pedoman Fiqih Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlâs , 1980), h. 77

4. Sebagian ulama memandang bahwa semua upah yang berkenaan dengan ibadah sama dengan memakan harta manusia dengan cara tidak halal.

Berdasarkan hukum Islam sistem pengupahan disebut dengan (*ijarah*) yang terjadi telah memenuhi rukun akad dalam *al-ijarah* akan tetapi dalam syarat masih belum terpenuhi yaitu ditemukan adanya salah satu pihak yang menyatakan tidak rela atas perjanjian yang dilakukan, yang manahal tersebut dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya. Hal tersebut tidak dibenarkan dalam segi hukum Islam. Hal ini telah dijelaskan di dalam firman Allah dalam surat An-Nisa (4): ayat 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT melarang hambanya dimuka bumi memakan harta dari jalan yang haram kecuali berdasarkan kerelaan hati masing-masing maka bolehlah kamu memakanya.¹⁰

Konsekuensinya yang timbul dari adanya ketentuan ini karena sistem pengupahan pekerja harus sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang telah ditetapkan. Upah harus dibayar tidak kurang, tidak juga lebih dari apa yang telah dikerjakan.

¹⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur''an dan terjemah* (semarang.CV.Asy Syifa, 2000), h.422

Perjanjian kerja disebut yayasan maupun perusahaan idealnya melindungi semua kepentingan pihak yang terkait dalam perjanjian karena sebuah perjanjian semestinya dibuat berdasarkan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak, karena terdapat hak dan kewajiban kedua belah pihak. Berkaitan dengan hal ini penulis melakukan penelitian Yayasan Tunas Karya Unit 1 Di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negri Besar Kabupaten Way Kanan, adanya sebuah aturan ketentuan atau ketetapan yang berkaitan dengan pengupahan yaitu terjadinya pemotongan upah pekerja oleh pihak penghubung Yayasan dengan tenaga kerja, pekerja yang tersalurkan tidak menerima upah di awal bulan pertama bekerja dan sampai 3 bulan. Upah di 3 bulan awal diberikan dengan sistem dirapel atau digabungkan di bulan berikutnya kemudian langsung akan di potong dengan biaya administrasi Yayasan yang berjumlah Rp. 4.000.000. (empat juta rupiah).

Adapun alasan Yayasan memberikan upah dengan cara dirapel pada tiga bulan awal bekerja dikarenakan menghindari pekerja agar tidak melakukan hal-hal yang merugikan majikan dan Yayasan. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya bahwa masa tiga bulan pertama adalah masa percobaan pekerja.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang sistem pemotongan upah diatas. Salah satu aspek muamalah yang sangat penting dan dapat dilakukan setiap manusia adalah upah mengupah, yaitu memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.¹¹

Dalam sistem pengupahan yang terjadi di Yayasan Tunas Karya kegiatan seperti ini ada baiknya jika dianalisis perspektif hukum Islam. Dalam hal ini akan dibahas tentang lembaga

¹¹ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islamdi Indonesia (Aspek Hukum Kelluarga danBisnis)*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 141

penyalur dari sudut pandang Hukum Islam. Oleh sebab itulah membuat penulis untuk memecahkan masalah dan menyelesaikan masalah dengan judul: **“Sistem Pemotongan Upah Sebagai Jasa Penyalur Tenaga Kerja Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Yayasan Tunas Karya Unit 1 Desa Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)”**.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu:

1. Masih adanya unsur ketidak jelasan sehingga belum terciptanya nilai keadilan dalam pemberian upah yang di terapkan oleh Yayasan Tunas Karya Unit 1 Desa Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar
2. Pandangan dari segi hukum Islam terhadap praktek Sistem Pemotongan Upah Sebagai Jasa Penyalur Tenaga Kerja Rumah Tangga di Yayasan Tunas Karya Unit 1 Desa Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar

D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Pada penelitian dalam Skripsi ini fokus pada permasalahan pemotongan upah pekerja di Yayasan Tunas Karya Unit 1 Desa Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan

2. Sub Fokus Penelitian

- a. Pelaksanaan praktik Sistem Pemotongan Upah pekerja rumah tangga Pada Penyalur Tenaga Kerja di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Waykanan
- b. Pandangan hukum Islam Tentang Pemotongan Upah pekerja rumah tangga pada yayasan tenaga kerja Unit I di

Desa Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Waykanan

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Pemotongan Upah pekerja rumah tangga Pada Penyalur Tenaga Kerja di Yayasan Tunas Karya Unit 1 Desa Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Tentang Pemotongan Upah pekerja rumah tangga pada Yayasan Tunas Karya Unit 1 Desa Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Sistem Pemotongan Upah pekerja rumah tangga Pada Penyalur Tenaga Kerja di Yayasan Tunas Karya Unit 1 Desa Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan
2. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam Tentang Pemotongan Upah pekerja rumah tangga pada Yayasan Tunas Karya Unit 1 Desa Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan

G. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi di Fakultas Syariah dan Hukum diharapkan sumbangsih pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan Hukum agar tetap hidup dan berkembang khususnya tentang Bagaimana pemotongan

upah pekerja Pada Yayasan Tunas Karya Unit 1 Desa Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan

2. Secara Praktis penelitian ini memberikan pengetahuan kepada para pembaca terutama tentang bagaimana melihat sudut pandang tentang hukum Islam dalam meninjau pemotongan upah pekerja

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebelum penelitian ini dilakukan maka terlebih dahulu penulis akan melakukan kajian dari penelitian sebelumnya yang sudah ada agar menghindari kesamaan pada sebelumnya, maka berikut merupakan penelitian- penelitian terlebih dahulu yang berkaitan dengan penelitian pada skripsi ini, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis Deni Susanto dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemotongan Gaji Karyawan Akibat Hilangnya Barang Perusahaan (studi pada Indomaret Fajar Bulan Lampung Barat)” Dari skripsi bisa diambil kesimpulan bahwa Dasar dari pemotongan upah gaji karyawan yang diakibatkan hilangnya barang adalah perjanjian kerja didalamnya memuat tentang hubungan kerja dan karyawan mengenai tatacara, upah, hak dan kewajiban dan aturan lain yang berlaku diperusahaan. Jika terjadi barang rusak atau hilang akibat kelalaian karyawan dan hilangnya mencapai batas maksimal maka seluruh karyawan secara bersama bertanggung jawab dengan dipotongnya gaji bulanan sesuai dengan jabatannya. Tinjauan hukum Islam pemotongan gaji akibat hilangnya barang perusahaan itu tidak boleh diberlakukan. Ada ahli Fiqih melarang denda disebabkan barang rusak dalam waktu bekerja bukan karena kelalaian. Dengan alasan hilang atau rusaknya barang oleh karyawan tertuang dalam perjanjian.¹²

¹² Skripsi Deni Susanto, Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemotongan Gaji Karyawan Akibat Hilangnya Barang Perusahaan (studi pada Indomaret Fajar Bulan

2. Skripsi yang ditulis Lia Resti Carlina dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawan Berdasarkan Persentase Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi di SPA dan Salon Muslimah Az-Zarah di Bandar Lampung). Kesimpulan dari skripsi adalah, Mekanisme pengupahan di SPA dan Salon Muslimah AzZarah di Bandar Lampung belum menjalankan ketentuan upah mengupah dalam penentuan jumlah upah masih jauh dari ketentuan Fiqih Muamalah yang mengharuskan suka sama suka dan belum „dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-hak nya adalah memberikan hak kepada pekerja yang telah memenuhi hak dan kewajibannya sebagai pekerja atau buruh di suatu perusahaan. Dan belum memeperhatikan kepentingan atau kewajiban pekerja untuk menerima upah setelah melakukan kewajibannya, seperti datang ketempat kerja dan tidak diberikan upah. Disamping itu pada SPA salon muslimah Az-Zahra ini belum bergerak tanpa aturan yang berlaku Sistem pengupahan karyawati SPA salon muslimah Az-Zahra ditinjau dari fiqih muamalah menggunakan sistem borongan. Dimana setiap pekerja diupah berdasarkan persentase atau unit hasil yang sama halnya dengan sistem borongan yang akan menghasilkan banyak, yang sedikit akan menghasilkan sedikit.¹³
3. Skripsi ini yang ditulis oleh Dewi Lestari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul " Sitem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Koroweleng Cepiring-Kendal). Skripsi ini berkesimpulan bahwa, sistem pengupahan pada UMKM kurang baik produksi ikan teri salim group karena majikan tidak

Lampung Barat)" Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, 2017.

¹³ Skripsi, Lia Resti Carlina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawan Berdasarkan Persentase Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi di SPA dan Salon Muslimah Az-Zarah di Bandar Lampung). Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, 2019.

menyebutkan besarnya upah yang akan diperoleh pekerjaannya secara jelas sebelum pekerjaan dimulai. Sehingga banyak pekerja yang tidak mengetahui secara jelas berapa upah kerjanya setiap 1 kg-nya. Jika dilihat dari ekonomi islam, UMKM produksi ikan teri salim group belum baik, karena nilai-nilai dalam ekonomi islam belum sepenuhnya terpenuhi. Konsep upah dalam ekonomi lebih menekankan pada upah pekerja diberikan secara adil dan layak.¹⁴

4. Skripsi yang telah ditulis oleh Noermalia, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemotongan Upah Untuk Asuransi Syariah Dan BPJS Kesehatan Karyawan Swasta PT Kent Trasindo Indonesia Surabaya”. Skripsi ini berkesimpulan Bahwa, praktek pengupahan yang terjadi di PT Kent Trasindo Surabaya Pemotongan upah untuk BPJS diperbolehkan dan wajib bagi pemberi kerja memotong upah pekerja untuk pembayaran BPJS kesehatan ini dikarenakan peraturan perundang - undangan. Namun untuk pemotongan BPJS kesehatan untuk keluarga pekerja dan asuransi harus ada surat kuasa dari pekerja untuk dapat memotong iuran dari upahnya. Dan memberitahukan manfaat dan informasi yang terkait dengan jaminan sosial yang diterima pekerja. Hal ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 22. Analisis hukum Islam mengenai adanya pemotongan – pemotongan yang terjadi di PT Kent Trasindo ini harus didasari dengan adanya kerelaan atas kedua pihak yang berakad. Agar terjalin saling percaya diantara kedua pihak, maka diadakannya akad atau perjanjian kerja yang mengakibatkan terikatnya dan timbul hak dan kewajiban kedua pihak. Sehingga tidak ada yang merasa terdzalimi atas perbuatan salah satu pihak. Dan tidak ada paksaan dan

¹⁴ Skripsi Dewi Lestari ” Sitem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Koroweleng Cepiring-Kendal). Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2019.

ketidaktahuan atau ketidakpahaman atas apa yang di transaksikan.¹⁵

I. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasannya karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penggunaan metode tersebut akan disebarkan sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau diresponden.¹⁶ Yaitu melakukan penelitian dilapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi subjek yang bersangkutan. Selain dilapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan literatur yang ada diperpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

Dalam hal ini penulis memperoleh data dari data lapangan yaitu melalui langsung kepada pihak penyalur tenaga kerja Yayasan Tunas Karya Unit 1 Di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.

¹⁵ Skripsi Noermalia “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemotongan Upah Untuk Asuransi Syariah Dan BPJS Kesehatan Karyawan Swasta PT Kent Trasindo Indonesia Surabaya”. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 4

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini skripsi ini bersifat deskriptif analisis, yakni suatu penelitian yang menjelaskan atau menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dalam proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana agar mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi di lapangan.

Dalam hal ini akan di dekripsikan bagaimana pandangan Islam terhadap sistem pemotongan gaji yang tidak sesuai dengan akad pada Yayasan Tunas Karya Unit 1 Di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negri Besar Kabupaten Way Kanan.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen guna keperluan penelitian yang dimaksud. Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang di analisis, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi.¹⁷ Pada umumnya data primer dianggap lebih baik dari data sekunder. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu data primer lebih bersifat terperinci dari data sekunder. Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian, seperti data primer yang diperoleh dari hasil wawancara kepada responden.

¹⁷Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relation* dan komunikasi (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 29.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan data yang berisikan tentang informasi yang menjelaskan dan membahas tentang data primer. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis lakukan, antara lain: Al-Quran, hadist, buku, kitab-kitab fiqih, skripsi, dan literatur-literatur lainnya yang mendukung.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.¹⁸ Maka untuk teknik pengumpulan data diperlukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dengan cara memperhatikan sesuatu melalui pengamatan terhadap suatu objek penelitian tanpa ada pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut.¹⁹ Observasi dilakukan secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dimana penelitian mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada responden.²⁰ Interview dilakukan kepada para informan yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi, data interview dapat diperoleh dari hasil wawancara kepada responden yang terdiri dari para pedagang, serta pihak-pihak yang dianggap tahu tentang penelitian ini.

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 224.

¹⁹Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 154.

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methodes* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 188.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berdasarkan catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto, dokumen rapat, dan agenda.²¹

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.²²

Populasi dalam penelitian ini adalah 105 orang pekerja yang terdaftar di penyalur tenaga kerja Yayasan Tunas Karya Unit 1 di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negri Besar Kabupaten Way Kanan, serta 5 orang pengurus Yayasan Tunas Karya Unit 1. Berdasarkan data tersebut maka jumlah populasi dalam penelitian ini ialah 110 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi.²³ Dalam penelitian kualitatif sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual, maksud sampling disini adalah untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber dan bangunannya (*constructions*). Menurut Suharsimi Arikunto, sebagai perkiraan apabila subjek kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, jika subjek besar maka diambil 10-

²¹*Ibid*, h.28

²²J. Supranto, *Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1993), h. 81.

²³Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 38.

15% atau 20-5%.²⁴ Sampel yang diambil oleh penulis adalah sebanyak 10% dari total populasi yang mana jumlah sampel menjadi 11 orang, diantaranya yaitu 9 orang pekerja yang terdaftar di Yayasan Tunas Karya Unit 1 dan 2 orang pengurus Yayasan Tunas Karya Unit 1.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Metode pengolahan data yang dilakukan setelah data terkumpul baik berupa data primer maupun data sekunder, langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.²⁵ Dalam proses editing dilakukan pengoreksian data terkumpul sudah cukup lengkap dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.

b. Sistematisasi Data (*systematizing*)

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokkan data secara sistematis dari yang sudah diedit diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.

6. Analisis Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam analisis data, digunakan data kualitatif, karena data yang diperoleh dari literatur yang ada

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 112

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 222

dilapangan, kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu penelitian untuk memberikan gambaran atau deskriptif tentang keadaan yang dilakukan secara objektif, kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif.

Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, yang bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat umum ini hendak menilai kejadian yang khusus.²⁶ Selain metode deduktif, penulisan ini juga menggunakan metode induktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa peristiwa konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut diarik generalisasi yang bersifat umum.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk Menghasilkan suatu kerangka penelitian ini untuk menindak lanjuti penulisan sebelumnya, penulis memnuat sistematika pembahasan yang sederhana, yang dikelompokkan menjadi beberapa sub bab yang merupakan eksplorasi dari semua isi kandungan peneitian ini. Pembagian bab dan sub bab tersebut bertujuan untuk memudahkan pembahasan dalam penulisan dan menganalisa data, telaah masalah-masalah dan temuan-temuan yang telah ada, agar lebih mendalam dan komprehensif, sehingga nantinya lebih mudah dipahami.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dimulai dengan penegasan judul, latar belakang masalah untuk mendeskripsikan alasan penelitian ini dilakukan, fokus dan sub fokus penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan masalah yang berguna membantu peneliti memfokuskan terhadap kajian yang dilakukan. Kemudian tujuan penelitian yang berguna

²⁶*Ibid*, h. 180

untuk mengetahui dapat atau tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan. Setelah itu adalah manfaat penelitian, setelah itu kajian penelitian terdahulu yang relevan untuk apakah penelitian ini jika dilihat dari penelitian terdahulu. Kemudian, dilanjut dengan metode penelitian yang berisi jenis penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan Analisa data, dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab kedua ini berisikan teori, yang merupakan alat untuk menganalisis data yang di peroleh dari lapangan. Isi dari bab ini yaitu akan di uraikan mengenai Akad Dalam Hukum Islam yang mana di dalam nya akan membahas mengenai pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, ketentuan dalam akad. teori selanjutnya mengenai pengupahan dalam hukum islam didalam nya akan membahas mengenai pengertian upah, dasar hukum upah, rukun dan syarat upah, macam-macam upah, sistem pembayaran upah, pelaksanaan upah, berakhirnya upah. Kemudian, pada bab ini juga akan membahas mengenai asas-asas penjanjian menurut islam serta ketentuan upah menurut hukum Islam dan Hukum positif.

BAB III : DESKRIPSI DATA PENELITIAN

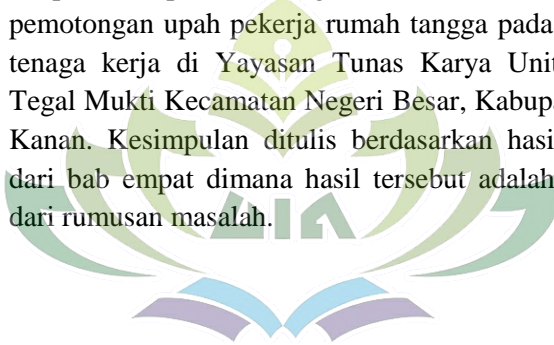
Pada bab ini berisikan gambaran umum Yayasan Tunas Karya Unit 1 yang menjelaskan informasi mengenai sejarah singkat Yayasan Tunas Karya Unit 1, struktur organisasi Yayasan Tunas Karya Unit 1, Visi dan Misi Yayasan Tunas Karya Unit 1, serta Perjanjian Kerja YTKI dan Yayasan Tunas Karya Unit 1. Kemudian akan menjelaskan mengenai pelaksanaan pemotongan upah di Yayasan Tunas Karya Unit 1.

BAB IV : ANALISIS PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan pokok pembahasan yang meliputi sistem pemotongan upah pekerja rumah tangga pada penyalur tenaga kerja di Yayasan Tunas Karya Unit 1 Desa Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, serta perspektif hukum Islam tentang pemotongan upah pekerja rumah tangga pada penyalur tenaga kerja di Yayasan Tunas Karya Unit 1 Desa Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran serta lampiran-lampiran sebagai solusi dalam sistem pemotongan upah pekerja rumah tangga pada penyalur tenaga kerja di Yayasan Tunas Karya Unit 1 Desa Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan. Kesimpulan ditulis berdasarkan hasil analisis dari bab empat dimana hasil tersebut adalah jawaban dari rumusan masalah.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa arab yang berate mengikat, menetapkan dan membangun. Kata akad kemudian diserat kedalam bahasa Indonesia yang berarti janji, perjanjian, dan kontrak. Pertalian ijab qabul (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan syari'at yang ada pada obyek perikatan.²⁷

Secara bahasa akad mempunyai beberapa arti, antara lain:²⁸

- a. Mengikat (*Ar- Aabthu*), yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung dikemudian menjadi sepotong benda.
- b. Sambungan (*Aqdatun*), yaitu sambungan yang menjadi memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- c. Janji (*Al-ahdu*), yaitu siapa saja yang menepati janji dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertaqwa.

Sebagaimana dijelaskan dalam QS: Al-Maidah (5) ayat 1 yaitu tentang suatu aqad.

²⁷Abdur Rohman, *Analisis Penerapan Akad Ju'alah Dalam Multi Level Marketing*, (Al Adalah Vol.XIII.No.2, Desember 2016), h.180

²⁸M. Ali hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Figh Muamalat)*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003),h.101

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَةٌ الْأَنْعَامِ
إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا

يُرِيدُ ﴿٦٦﴾

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*²⁹

Istilah *al-'aqd* dalam Al-Qur'an mengacu pada pertayaan seseorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh terhadap janji yang dibuat orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam Al Qur'an surah Al-Imran ayat 76 bahwasanya Allah SWT berfirman:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

*(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.*³⁰

Akad menurut istilah adalah keterkaitan dalam keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan adanya komitmen yang telah di syariatkan. Kata akad menurut istilah terkadang dipergunakan dalampengertian umum, yakni

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Diponogoro, 2014), h.106

³⁰ *Ibid*, h. 131

sesuatu yang dikaitkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus.³¹

Menurut istilah *fiqih*, secara umum akad berarti suatu yang menjadi tekat seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari dua pihak, seperti wakaf, talak, dan juga sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab dan qabul, dalam lingkup yang di syariatkan dan berpengaruh dalam sesuatu.³² Istilah “Perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “Akad” di dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-,,aqd*, yang berarti mengikat. Menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwaasanya menurut pengertian lainnya menjelaskan bahwa *Ijarah* adalah upah yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan suatu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya.

2. Dasar Hukum Akad

Berdasarkan dalam al- Qur'an surah Al Imran ayat 76 bahwasanya Allah SWT berfirman:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.³³

³¹Abdullah AL-Mushlih dan shalah Ash-Shawi, *fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta : Darul Haq, 2008), h.26.

³²Abdullah AL-Mushlih dan shalah Ash-Shawi, *fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta : Darul Haq, 2008), h. 54

³³ Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Diponogoro, 2014), h. 673

Berdasarkan ayat di atas maksud akad di atas yang di adakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho/ rela akan isi akad tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu ke pihak yang lain, dengansendirinya akad yang diadakan tidak didasarkan kepada kehendak padasalah satu pihak yang mengadakan perjanjian dan apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi akad, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalah pahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari.³⁴

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhan masing-masing maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukunnya ialah sebagai berikut:³⁵

1. *Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang, seorang yang berakad orang yang memiliki hak. Ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi *aqid*, antara lain:

- a) *Ahliyah* keduanya memiliki kecakapan dan keputusan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah baligh

³⁴Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta :Sinar Grafika, Cetakan Ketiga,2004), h.2-3.

³⁵Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grapfindo Persada, 2010), h.68.

atau mumayiz dan berakal. Berakal yang dimaksud disini ialah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang-orang normal. Sedangkan mumayiz disini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk antara berbahaya dan tidak dan antara merugikan dan menguntungkan.

- b) *Wilayah* yang dimaksud dengan wilayah sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar'ii untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi sehingga ia memiliki dan otoritas untuk mentransaksikannya. Dan yang terpenting orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.

2. *Ma'qud* adalah benda yang diakadkan seperti benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, dalam gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.

3. *Maudhu Al'aqd* adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad tersebut.

4. *Sighat Al'Aqd* yaitu ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seseorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Sedangkan qabul yaitu perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah ijab.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam sight *al-aqd* ialah:³⁶

- a. *Sighat al-aqd* harus jelas pengertiannya, kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak banyak memiliki banyak pengertian.
- b. Harus sesuai antara ijab qabul, tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafadz.
- c. Megambarkan kesungguhan. Kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam *tijarah* harus saling ridho.

2. Syarat Akad

Syarat akad dibagi menjadi tiga macam, yaitu:³⁷

a. Syarat terbentuknya akad (*syurut al-in-iqad*)

Masing-masing rukun atau unsur yang membentuk akad diatas memerlukan syarat-syarat agar rukun itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat yang dimaksud,

Rukun akad tidak dapat membentuk akad. Dalam hukum Islam syarat yang dimaksud dinamakan syarat terbentuknya akad.

Rukun pertama yaitu para pihak harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad,yaitu:

- 1). Tamyiz
- 2). Terbilang (*at-ta'addud*)

Rukun kedua yaitu pernyataan kehendak, harus memenuhi dua syarat akad, yaitu:

- 1) Adanya penyesuaian ijab qabul dengan kata lain tercapainya kata sepakat.

³⁶Sohari Sahari, *Fiqh Muamalat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.43.

³⁷Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*..., h. 99.

2) Kesatuan majelis akad.

Rukun akad ketiga yaitu objek akad harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

- 1) Objek itu dapat diserahkan
- 2) Tertentu atau dapat ditentukan
- 3) Objeknya dapat ditransaksikan

b. Syarat keabsahan akad (*syuruth ash-shihhah*)

Perlu ditegaskan bahwa dengan memenuhi rukun dan syarat terbentuknya suatu akad memang sudah terbentuk dan mempunyai wujud yuris syar'i namun belum serta merta sah. Untuk mengetahui sahnya akad, rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut memerlukan unsur-unsur penyempurna ini disebut keabsahan akad. Syarat keabsahan ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad atau paling tidak berlaku kebanyakan akad dan syarat keabsahan khusus yang berlaku pada masing-masing berbagai macam akad khusus.

c. Syarat berlakunya akibat hukum (*syuruth an-nafadz*)

Apabila memenuhi rukun dan syarat dan syarat terbentuk syarat - syarat keabsahan maka suatu akad dinyatakan sah. Akan tetapi meskipun sudah ada kemungkinan bahwa akibat-akibat hukum akad tersebut belum dapat dilaksanakan. Akad belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya itu, meskipun sudah sah disebut akad maukuf (terhenti atau tergantung). Untuk dilaksanakan akibat hukumnya, akad sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, yaitu adanya kewenangan sempurna atas objek akad

dan adanya kewenangan atas tindakan hukum yang harus dilakukan.³⁸

d. Syarat mengikatnya akad (*syarhul luzum*)

Pada dasarnya apabila suatu akad telah memenuhi rukun dan syaratnya maka akad tersebut sudah dapat dikatakan sah dan mengikat bagi para pihak. Maka tidak boleh salah satu menariknya kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain.³⁹

Sebenarnya akad harus dikhususkan untuknya beberapa syarat atau boleh juga dengan perkataan syarat-syarat *idlafiyh* (syarat-syarat tambahan) yang harus ada disamping syarat umum seperti syarat adanya saksi untuk terjadinya nika, dan seperti tidak boleh adanya ta'liq dalam aqad *mua'awadlah* dan aqad *tamalik* seperti jual beli dan hibah, ini merupakan syarat *idlafiyah*.

4. Macam-Macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu bisa dibagi jika dilihat dari berbagai segi. Berikut ini akan diuraikan akad dilihat dari segi keabsahan menurut syara', maka akad terbagi menjadi dua yaitu akad sah dan akad tidak sah. Untuk lebih mengetahuinya berikut akan diuraikan lebih jelas mengenai akad tersebut.

Akad sah ialah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sah ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak yang berakad. Akad sah ini dibagi oleh ulama hanafiyah dan malikiyah menjadi dua macam yaitu:⁴⁰

³⁸Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*..., h. 101

³⁹*Ibid.* h. 104

⁴⁰Wahab az-zuhaili, *alfiqh al-Islami wa adilatuhu*, jilid IV, (Beirut: dar al fikr, 1984), h. 231.

1. Akad *nafiz*

Akad *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan) yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakanya.

2. Akad *mauquf*

Akad *mauquf* yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuatan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad tersebut, seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang telah *mumayyiz*.

5. Ketentuan Dalam Akad

Akad terdiri dari beberapa macam yaitu akad bernama dan akad tidak bernama ada juga akad pokok dan aksesoir serta akad bertempo dan tidak bertempo yakni sebagai berikut:

- a. Akad bernama

Yang dimaksud dengan akad bernama adalah akad yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku pada akad lain. Ahli hukum klasik menyebutkan beberapa jenis akad, sehingga secara keseluruhan akad menurut perhitungan mencapai beberapa jenis akad bernama yaitu:⁴¹

1. Jual beli (*Al- Ba'i*)
2. Sewa-menyewa (*Al-Ijarah*)
3. Penanggungan (*Al-Kafalah*)
4. Pemindahan uang (*Al-Hiwayah*)
5. Gadai (*Ar-Rahn*)
6. Jual beli opsi (*Ba'tal-wafa*)

⁴¹Dr Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*..., h.73

7. Penipuan (*Al-ida*)
 8. Pinjam pakai (*Al-i`arah*)
 9. Hibah (*Al-hibah*)
 10. Pembangian (*Al-qismah*)
 11. Persekutuan (*Asy-syirkah*)
 12. Bagi hasil (*Al-mudharabah*)
 13. Penggarapan tanah (*Al-muzara`ah*)
 14. Pemeliharaan tanaman (*AL-Musaqah*)
 15. Pemberian kuasa (*Al-Wakalah*)
 16. Arbitase (*At-tahkim*)
 17. Pelepasan hak kewarisan (*Al-Mukharajah*)
 18. Pinjam mengganti (*Al-Qardh*)
 19. Pemberian hak pakai rumah (*Al-Umtah*)
 20. Penetapan ahli waris (*Al-Muamalah*)
 21. Pemutusan perjanjian atas kesepakatan (*Al-Iqadah*)
 22. Perkawinan (*Al-Zawaj*)
 23. Wasiat (*Al-Washiyyah*)
 24. Pengangkatan pengampu (*Al-isha*)
- b. Akad tak bernama

Akad tak bernama ialah akad yang tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fiqh dibawah satu nama tertentu. Dengan kata lain akad tak bernama ialah akad yang tidak ditempuh oleh pembuat hukum namanya yang khusus serta adapengaturan tersendiri mengenainya, terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan umum akad. Akad jenis ini dibuat dan ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebebasan dalam membuat akad tertentu (tidak bernama) ini termasuk kedalam apa yang disebut

dengan kebebasan berakad, akad tidak bernama ini timbul selaras dengan kepentingan para pihak dan akibat kebutuhan masyarakat yang terus berkembang contoh akad tak bernama ialah perjanjian, penerbitan, periklanan dan sebagainya.⁴²

b. Akad pokok dan akad asesoir

Dilihat dari kedudukannya akad dibedakan menjadi akad yang pokok (*al-„aqdal ashli*) dan akad asesoir (*„aq-aqd attab“i*), akad pokok adalah akad yang terdiri sendiri yang keberadaanya tidak tergantung kepada suatu hal lain termasuk kedalam jenis ini adalah semua akad yang keberadaanya karena dirinya sendiri, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, penitipan. Pinjam pakai, dan seterusnya. Akad asesoir adalah akad yang keberadaanya tidak berdiri sendiri melainkan tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidaknya akad tersebut. Termasuk dalam kategori ini adalah penanggungan (*kafalah*) dan akad gadai (*ar-rahn*) kedua akad ini merupakan perjanjian untuk menjamin karena itu keduanya tidak ada apabila hak-hak yang dijamin tidak ada.⁴³

c. Akad bertempo tidak bertempo

Dilihat dari unsur tempo akad dapat dibagi menjadi dua akad yakni akad bertempo (*al'aqd az-zamani*) dan akad tidak bertempo (*al'aqd al-fauri*). Akad bertempo adalah akad yang didalamnya ada unsur waktu merupakan unsur usia, dalam arti unsur waktu merupakan bagian dari isi perjanjian. Termasuk dalam kategori ini, misalnya sewa-menyewa, akad penitipan, akad pinjam akad, akad pemberian kuasa, akad berlangganan surat kabar dan lainnya.

⁴²Dr Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah....*, h.76

⁴³*Ibid.*, h.77.

Akad tidak bertempo adalah akad dimana unsur waktu tidak merupakan bagian dari isi perjanjian. Akad jual beli misalnya, terjadi seketika tanpa perlu unsur tempo sebagai bagian dari akad tersebut. Bahkan apabila jual beli dilakukan dengan hutang, sesungguhnya unsur waktu tidak merupakan ensensial, dan bila telah tiba waktu pelaksanaan, maka pelaksanaannya tersebut bersifat seketika dan pada saat itu hapuslah akad kedua belah pihak.⁴⁴

B. Pengupahan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Upah

Upah dalam Islam dikenal dengan *ijarah*. Secara etimologi *ijarah* berasal dari kata “*al-ajru*” yang berarti *al-wadh* atau penggantian.⁴⁵ *Ijarah* adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Untuk definisi ini digunakan istilah-istilah *ajr*, *ujrah*, dan *ijarah*. Kata *ajarah* digunakan apabila seseorang memberikan imbalan atas orang lain. Istilah ini hanya digunakan pada hal-hal positif, bukan pada hal-hal negatif. Kata *al-ajr* (pahala) biasanya digunakan untuk balasan di akhirat, sedangkan kata *ujrah* (upah sewa) digunakan untuk balasan dunia.⁴⁶ Sayid Sabiq mengemukakan bahwa *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadh* (sewa menyewa atau imbalan, ganjaran atau pahala). Jadi *ijarah* menurut bahasa dan secara syara’ memiliki makna jual-beli manfaat.⁴⁷

⁴⁴*Ibid.*, h.77

⁴⁵Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 277.

⁴⁶A. Riswan Amin, *Buku Pintar Transaksi Syariah (Menjalankan Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam* (Jakarta: Mizan Publika, 2010), h. 145.

⁴⁷Eka Nuraini, Ab Mumin bin Ab Ghani, Akad Penerbitan Sukuk Di Pasar Modal Indonesia dalam Perspektif Fikih, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 14 No. 1, 2017.

Ijarah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *ijarah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad *ijarah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun akad *ijarah* kadang-kadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam akad *ijārah* tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. *Ijarah* dalam pengertian ini bisa disamakan dengan upah-mengupah dalam masyarakat.⁴⁸

Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi. Jika pekerja tidak menerima upah akan mempengaruhi standar penghidupan bagi para pekerja.⁴⁹

Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja. Karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah.

Akad yang sesuai dengan syari'ah adalah yang tidak mengandung *gharar* (ketidakpastian atau penipuan), *maysir*

⁴⁸ M. Yazid Affandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka), h. 180.

⁴⁹ Mursa, "Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan" dalam Perspektif Ekonomi Darussalam (Sumatera Barat: Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat), Vol. 1 No. 1 (Maret 2015), h. 9

(perjudian), riba (bunga uang) yang mana semua ulama sepakat bahwa riba adalah sesuatu yang diharamkan dalam Islam, hal ini dikarenakan makna riba sendiri adalah tambahan (*ziyadah*) atau dapat dikatakan keuntungan moneter.⁵⁰ Selain riba akad tidak dianggap sah jika mengandung *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ini merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad ini kita bisa melakukan berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Seseorang lelaki dan perempuan saat disatukan dalam menjalani kehidupan dengan akad. Dengan adanya akad dapat memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi tanpa bantuan dan jasa orang lain.⁵¹

Dapat dibenarkan bahwa akad adalah merupakan sarana sosial yang ada dan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dengan makhluk sosial. Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan kita tiada lepas dari akad (perjanjian), yang menjadikan sarana dalam memenuhi berbagai bentuk kepentingan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa betapa pentingnya akad (perjanjian).⁵²

Upah menurut istilah terminologi, upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberikan imbalan menurut syarat-syarat tertentu. Upah adalah pemberian imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu di berikan menurut perjanjian yang

⁵⁰ Abdul Qodir Jaelani, “Bunga Bank Dalam Perspektif Sosio-Ekonomi Dan Ushul Fiqh (Studi Atas Pemikiran M. Umer Chapra)”, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), Vol. 4, No. 2, (2012), h. 1.

⁵¹ Mursa, “Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan” dalam Perspektif Ekonomi Darussalam (Sumatera Barat: Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat), Vol. 1 No. 1 (Maret 2015), h. 10

⁵² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h. 114.

telah disepakati.⁵³ Dalam pandangan syariat Islam upah adalah hak dari orang yang telah bekerja dan kewajiban orang yang mempekerjakannya untuk membayarnya. Upah adalah hak dari seorang buruh sebagai harga atas tenaga yang telah disumbangkannya dalam proses produksi dan pemberi kerja wajib membayarnya.⁵⁴ Ada beberapa para ahli yang mendefinisikan *ijarah* adalah sebagai berikut:

- 1) Hanafiyah, beliau menyatakan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta.
- 2) Malikiyah berpendapat bahwa *ijarah* adalah manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.
- 3) Syafi'iyah berependapat bahwa *ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, mengandung maksud tertentu, bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan dengan cara memberi imbalan (upah) tertentu.
- 4) Hanabilah berpendapat bahwa *ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *ijarah* dan *kara'* dan semacamnya.⁵⁵
- 5) Al-Syarbini mendefinisikan *ijarah* sebagai akad untuk menukar manfaat suatu barang dengan sesuatu, di mana manfaat tersebut merupakan manfaat yang halal dan diperbolehkan oleh *syara'*.⁵⁶
- 6) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *ijarah* adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa

⁵³H.A.Khamedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung:IAIN Raden Intan Lampung), h. 149.

⁵⁴M. Harir Muzaki, Ahmad Sumanto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan, *Journal Al-Adalah*, Vol. 14, No. 2, 2017.

⁵⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h.316.

⁵⁶Muhammad Al-Khatib Asl-Syarbini, *Mughni Al-Mukhtaj Ila Ma'rifah Al-Alfaz* (Digital Library, Al-Maktabah Al-Syumilah Al-Isdar Al-Sani, 2005), h. 363.

tertentu yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan sama dengan menjual manfaat.⁵⁷

- 7) Fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan *ijarah* bahwa *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Akad *ijarah* adalah akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* dengan *a'jir* untuk mempertukarkan manfaat dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa.
- 8) Kitab Hukum Ekonomi Syariah Buku II Bab I Pasal 20 ayat disebutkan bahwa *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.

Secara istilah *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁵⁸

Ada yang menerjemahkan *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang dan keduanya benar. Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaat bukan bendanya.⁵⁹

Sedangkan ensiklopedia fiqh mendefinisikan *ijarah* adalah akad penukaran terhadap manfaat suatu barang dengan harga atau barang tertentu.⁶⁰ Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka pada intinya upah (*ijarah*) adalah akad pemindahan suatu hak atas barang atau jasa (manfaat) tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas benda yang

⁵⁷Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalat* (Semarang: Pustaka Riski Putra, 1999), h. 85-86.

⁵⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 387.

⁵⁹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h.122.

⁶⁰Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 102.

dimanfaatkan, melalui pembayaran sewa. Manfaat (jasa) yang disewakan adalah sesuatu yang dibolehkan menurut ketentuan syariat dan dapat dimanfaatkan atas suatu objek yang disewakan.

Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian.⁶¹ Mengenai masalah pengupahan, Islam menetapkan suatu pembahasan dalam kitab fiqh, yang terdapat dalam al-*ijarah*. *Ijarah* merupakan suatu jenis akad antara dua pihak yang berkaitan dengan manfaat atau jasa dalam tempo yang telah disepakati berdasarkan ketentuan syariat. Dalam konsep *ijarah* pemilik yang menyewakan suatu manfaat kepada orang lain disebut *musta'jir* dan sesuatu yang diadakan untuk diambil manfaatnya disebut dengan *mu'jir*, serta jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat *ajran* atau *ujrah*. Ketika akad *ijarah* telah terjadi secara sah, maka *musta'jir* sudah berhak atas manfaat, dan orang yang menyewakan sudah berhak atas upah sebagai pengganti manfaat yang disewakan karena *ijarah* termasuk jenis transaksi tukar-menukar.

Ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Islam. Bolehnya hukum *ijarah* berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist nabi.⁶² Pada dasarnya *ijarah* adalah salah satu bentuk kegiatan antara para pihak yang melakukan akad guna meringankan pekerjaan salah satu pihak, serta merupakan bentuk kegiatan sosial yang saling menolong antara sesama sesuai dengan ajaran agama.⁶³ Dan

⁶¹Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h. 141.

⁶²Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 216.

⁶³Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*...., h. 30.

tujuan disyariatkannya *ijarah* ialah guna memberikan keringanan kepada sesama manusia. Seseorang mempunyai uang namun tidak dapat bekerja, dan di pihak lain ada yang mempunyai tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya *ijarah* keduanya saling mendapat keuntungan.⁶⁴

2. Dasar Hukum Upah

Hampir semua ulama fiqh sepakat bahwa *ijarah* disyari'atkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar Al-Asham dan Ibnu Ulayyah. Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati *ijarah* tersebut. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma'.

a. Al-Qur'an

1) Firman Allah Swt. QS. Al-Baqarah [2] : 233

﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرَضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا

سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh....*, h. 217.

bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al-Baqarah [2] : 233).⁶⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberikan upah yang sepantasnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.⁶⁶

2) Firman Allah Swt. QS. Az-Zukhruf [43] : 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا ۖ وَرَحِمَتْ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا
تَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian

⁶⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang:Kumudasmoro Grafindo,1994), h. 8.

⁶⁶Ahmad Mushtofa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi, Cet. I* (Semarang: Toha Putra, 1984), h. 350.

mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS. Az-Zukhruf [43] : 32).⁶⁷

Ayat tersebut dijelaskan bahwa ada sebagian dari mereka yang diberikan kelebihan untuk membagi dari sebagian apa yang mereka punya. Seperti contoh nya: pemilik perusahaan yang memiliki kelebihan materi dan pemilik usaha tersebut mencari karyawan agar dapat membagi sebagian dari harta mereka tersebut agar menjadi manfaat untuk saling tolong menolong sesama manusia.

3) Firman Allah Swt. QS. Al-Qasash [28] : 26



قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَىٰ أَسْتَجِرُّهُ إِنِّي خَيْرٌ مِّنْ أَسْتَجِرَّتَ
الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (QS. Al-Qasash [28] : 26)⁶⁸

Ayat di atas menerangkan bahwa upah / *Ijarah* telah di syariatkan oleh umat Islam, dalam ayat ini terdapat pernyataan seorang anak yang meminta ayahnya untuk mengambil seseorang untuk bekerja dan mengambil imbalan yang telah di sepakati sesuai dengan ketentuan waktu dan manfaat yang dapat di terima.

⁶⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Kumudasmoro Grafindo,1994), h. 798.

⁶⁸*Ibid.*, h. 613.

b. As-Sunnah

Selain ayat *Al-Qur'an* di atas, ada beberapa *hadist* yang menegaskan tentang upah, *hadist* Rasulullah Saw. sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرُقُهُ (راوه ابن ماجه)

“Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah Saw: berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah, shahih).⁶⁹

Hadist riwayat Ibnu Sa'id al-Khudri, Nabi Saw. bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَأَيْسَمَ لَهُ أَجْرَ تَهُ (رَاوَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ)

“Dari Abu Sa'id Al-Khudri ra. bahwasannya Nabi Saw. bersabda: “barang siapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya.” (HR. Abdurrazaq).⁷⁰

c. Ijma'

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijarah* diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para ulama tak seorang pun yang membantah kesepakatan *ijma'* ini. Sebagai mana diungkapkan Sayyid Sabiq:” dan atas disyariatkannya sewa menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap

⁶⁹Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram, Cet I* (Jakarta: Pustaka Amani, 1195), h. 361.

⁷⁰Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram, Cet I* (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 360.

(serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan *ijma'* para ulama ini, karena *al-ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁷¹

Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-qur'an dan Hadist dalam suatu perkara yang terjadi. Umat Islam pada masa sahabat telah ber *ijma* bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi umat manusia.⁷²

Ibnu Rusdy dalam Kitab Bidayah Al-Mujtahid, juga mengatakan bahwa “sesungguhnya sewa menyewa itu dibolehkan oleh seluruh *fuqaha* negeri besar dan *fuqaha* masa pertama”. *Al-Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁷³

3. Rukun dan Syarat Upah

a. Rukun Upah (*Ijarah*)

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijarah* adalah ijab dan qobul, antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-ijarah*, *al-isti'jar*, *al-iktira*, dan *al-ikra*.⁷⁴

Adapun menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* ada (4) empat, yaitu:

⁷¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 13, Cet. I (Bandung: Al-Maarif, 1987), h. 18.

⁷²H. Abd. Rahman Dahlan, M.A., *Ushul Fiqh Cetakan Pertama* (Jakarta: 2010), h. 145-146.

⁷³Muhamad Syafe'I, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 117.

⁷⁴Rachmat Syafei, *Fikih Muamalah Kontempore....*, h. 125.

a) *Aqid* (orang yang berakal)

Mu'jir dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewakan sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.⁷⁵ Allah swt. berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa : 29)⁷⁶

Disyaratkan kepada seseorang yang telah melakukan akad untuk mengambil manfaat suatu barang untuk dijadikan sebuah akad agar mencegah terjadinya perselisihan. Dan disyariatkan untuk kedua belah pihak dan dapat membedakan. Tidaklah sah suatu akad tersebut apabila yang berakad itu gila atau anak kecil belum baligh dan belum dapat membedakan.⁷⁷

⁷⁵Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 170.

⁷⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*..., h. 122.

⁷⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4* (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006), h. 205.

b) *Sighat*

Yaitu orang yang melakukan *ijab* dan *qobul* (serah terima), baik diungkapkan dengan *ijab* dan *qobul* atau cukup dengan *ijab* saja yang menunjukkan *qobul* dari pihak lain (secara otomatis). Keinginan kedua belah pihak itu hal yang tidak nampak atau tersembunyi, maka harus diungkapkan dengan *sighat* atau *ijab qobul*.

Jika sudah terjadi *ijab qobul* sesuai dengan syarat-syarat sahnya, maka akad dan kesepakatan antara kedua belah pihak sudah terjadidan setiap pihak terikat dengan hak-hak dan kewajiban yang disepakati dalam akad.⁷⁸

c) Upah

Yaitu sesuatu yang menjadi objek dalam upah mengupah atau sesuatu yang dikerjakan adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut agama Islam. Adapun syarat-syarat dalam pembayaran upah (*ujroh*) adalah sebagai berikut:

- (1) Tidak berkurang nilainya.
- (2) Harus jelas, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan upahnya harus ditentukan dengan pasti terlebih dahulu.
- (3) Adanya manfaat yang jelas.
- (4) *Ma'qud alaihi* (barang yang menjadi objek) ialah sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada pekerjaan yang telah dikerjakan dengan beberapa syarat. Adapun salah satu syarat terpenting dalam transaksi ini adalah bahwa jasa yang diberikan adalah jasa halal.⁷⁹

d) Manfaatnya

Untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus mengetahui bentuk kerjanya, waktu, upah, serta

⁷⁸Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fiqh Muamalah*...., h. 27-28.

⁷⁹Rachmad Syafei, *Fiqh muamalah*...., h. 129.

tenagany. Oleh sebab itu jenis pekerjaan yang harus dijelaskan, sehinga tidak pergi, karena transaksi upah yang masih pergi hukumnya adalah *fasid*.⁸⁰ Karena itu semua harta benda boleh diakadkan *ijarah* atasnya, kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁸¹

- (1) Dalam sewa-menyewa harus diketahui secara jelas manfaat dari akad tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memeriksa atau pemilik memberikan informasi yang transparan tentang kualitas dan manfaat barang tersebut.
- (2) Objek *ijarah* dapat dimanfaatkan secara langsung dan diserahkan terimakan tidak mengandung cacat yang dapat menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi *ijarah* nya apabila harta benda masih dalam penguasaan pihak ketiga.
- (3) Objek *ijarah* berikut manfaatnya tidak boleh bertentangan dengan hukum *syara'*. Misalkan transaksi sewa-menyewa VCD pornografi maupun sewa-menyewa rumah untuk kegiatan maksiat maka tidaklah sah transaksi tersebut.
- (4) Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda. Maksudnya tidak dibenarkan sewa-menyewa atas manfaat suatu benda yang sifatnya tidaklah langsung. Sewa-menyewa yang mengandung ketidak jelasan seperti sewa pohon mangga untuk diambil buahnya.
- (5) Objek *ijarah* yang dijadikan harta benda haruslah harta yang bersifat *istihlahki*, harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya

⁸⁰M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2003), h. 231.

⁸¹Ghufran A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarata: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 183-185.

karena pemakaian. Seperti makan tidak sah *ijarahnya* atasnya.

b. Syarat Upah (*Ijarah*)

Sebagai sebuah transaksi umum, *al-ijarah* dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat yang berlaku pada *ijarah* sebagai berikut:⁸²

1) Syarat terjadinya akad

Syarat *al-inaqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan *aqid* yakni orang yang melakukan akad, zat akad, dan tempat akad.⁸³ Namun, tidak di syartkan baligh. ini berarti para pihak yang melakukan akad *ijarah* harus sudah cakap bertindak hukum sehingga semua perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan. Maka tidak dibenarkan memperkerjakan orang gila, anak-anak yang belum *mumayiz*, dan tidak berakal.

2) Keridhaan pihak yang berakad (*An-taradin*)

Artinya kedua belah pihak yang berbuat atas kemauan sendiri. Sebaliknya, tidak dibenarkan untuk melakukan upah mengupah atau sewa menyewa dengan paksaan dari salah satu pihak ataupun dari pihak lain.⁸⁴ Hal ini berdasarkan firman Allah swt:

3) Manfaat yang menjadi obyek *al-ijarah*

Harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari.

⁸²Dr. Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 197.

⁸³Helmi karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 34-35.

⁸⁴Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 80.

Apabila manfaat yang akan menjadi obyek *al-ijarah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan beberapa lama manfaat ditangan penyewa.

4) Penjelasan tempat manfaat

Manfaat tempat atau jasa yang disewakan hukumnya mubah secara syara', seperti sewa buku untuk belajar, sewa rumah untuk ditinggali dan sebaliknya. Tidak diperbolehkan untuk melakukan maksiat atau suatu yang dilarang syara'. Oleh karena itu tidak boleh menyewakan seseorang untuk melakukan pembunuhan atau menganiaya orang lain. Karena hal itu dilarang, dan secara syar'i tidak boleh dipenuhi.⁸⁵

4. Macam-Macam Upah

Akad *ijarah* dilihat segi objeknya, terbagi menjadi dua macam, yaitu: yang bersifat manfaat atas suatu benda atau barang dan yang bersifat manfaatnya atas pekerja (jasa). *Al-ijarah* yang bersifat manfaat atas benda, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, *took*, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat yang dibolehkannya syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa.

Ijarah yang bersifat manfaat atas pekerjaan (jasa) ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijarah* seperti ini, menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. *Al-ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang

⁸⁵Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 108.

menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk *al-ijarah* terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang, dan pembantu), menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh. Terkait dengan hal ini, termasuk menyewa terhadap manfaat atas karyanya seseorang yang berupa hak kekayaan intelektual (HAKI), seperti hak cipta, merk dagang, logo dan sebagainya.⁸⁶

Di dalam fiqh muamalah upah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Upah dalam perbuatan ibadah atau ketaatan, seperti dalam shalat, puasa, haji dan membaca *Al-Qur'an*. Namun hal ini diperselisihkan kebolehanannya oleh para ulama karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan ini. Pendapat Imam hanafi bahwa menyewa seseorang untuk melakukan perbuatan shalat, puasa, haji dan membaca *Al-Qur'an* yang pahalanya dijadikan kepada orang tertentu, seperti arwah ibu atau bapak yang menyewa maka haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut.⁸⁷
- b. Upah dalam sewa tanah, dibolehkan menyewa tanah, dan disyaratkan menjelaskan barang yang disewakan, baik itu berbentuk tanaman atau tumbuhan. Jika yang dimaksudkan adalah untuk pertanian, maka harus dijelaskna, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja, yang ia kehendaki, apabila syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka *ijarah* dinyatakan *fasid* (tidak sah). Karena kegunaan tanah itu bermacam-

⁸⁶Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhamadiyah University Perss, 2017), h. 124-125.

⁸⁷Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), h. 226.

macam, sesuai dengan tanaman. Seperti halnya juga memperlambat tumbuhnya yang ditanam di tanah.⁸⁸

- c. Upah menyusui anak, ada beberapa ulama yang pendapatnya berbeda-beda dalam upah menyusui anak di antaranya adalah As-Shahiban (murid Abu Hanifah) dan Ulama Syafi'iyah. Berdasarkan *qiyas* tidak boleh menyewa seorang perempuan untuk menyusui ditambah makanan dan pakaian karena ketidakjelasan upahnya.

5. Sistem Pembayaran Upah

Sistem pembayaran upah ini sangat penting dalam soal upah mengupah karena dengan sistem ini akan memperjelas kedua belah pihak mengenai waktu upah itu di berikan. Jika *Ijarah* adalah suatu pekerjaan maka kewajiban pembayaran upahnya pada masa berakhirnya pekerjaan. Jika tidak ada pekerjaan lain, sedangkan akad sudah berlangsung dan tidak disyariatkan dengan pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Sedangkan menurut Imam Syafei'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat barang yang disewakan kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.⁸⁹ Hak-hak menerima upah bagi seorang *musta'jir* yaitu:

- a. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan maka berikanlah upah sebelum keringatnya kering.
- b. Jika menyewakan barang, maka uang sewaan yang dibayarkan ketika akad sewa, kecuali dalam akad ditentukan lain. Manfaat barang yang diijarkan mengalir selama penyewaan berlangsung.

⁸⁸Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 13, *Fiqh Sunnah Terjemah Kamaluddin A.Marzuki* (Bandung: Al-Maarif, 1988), h. 24.

⁸⁹Abdul Rahman Ghazali, Dkk. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 280.

6. Pelaksanaan Upah

Pelaksanaan upah ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang saling berkaitan. Adapun faktor-faktor tersebut adalah :

a. Bentuk dan Jenis Pekerjaan

Menentukan bentuk dan jenis pekerjaan sekaligus menentukan siapa pekerja yang akan melakukan pekerjaan tersebut adalah penting, agar dapat diketahui seberapa besar kadar pengorbanan yang dikeluarkan. Juga disyaratkan agar ketentuan bisa menghilangkan kekaburan persepsi sehingga transaksi *ijarah* tersebut berlangsung secara jelas. Setiap transaksi *ijarah* disyaratkan harus jelas. Apabila ada unsur kekaburan, maka status hukumnya tidak sah.

1. Masa Kerja

Dari segi masa kerja yang ditetapkan, transaksi *ijarah* dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut:

- a) Ada transaksi yang hanya menjelaskan takaran pekerjaan yang dikontrak saja tanpa harus menyebutkan masa kontrak/kerja, seperti pekerjaan menjahit pakaian dengan model tertentu sampai selesai. Maka berapapun lamanya seorang pekerja harus menyelesaikan pakaian tersebut.
- b) Ada transaksi *ijarah* yang hanya menyebutkan masa kerja tanpa harus menyebutkan takaran kerja. Contohnya: pekerjaan memperbaiki bangunan selama satu bulan. Bila demikian orang tersebut harus memperbaiki bangunan selama satu bulan, baik bangunan tersebut selesai diperbaiki maupun tidak. Ada transaksi *ijarah* yang menyebutkan masa kerja sekaligus menyebutkan takaran kerja. Misalnya, pekerjaan membangun

rumah yang harus selesai dalam waktu tiga bulan.⁹⁰

2. Upah Kerja

Jika kewajiban dari pekerja sudah dipenuhi kepada majikan, maka untuk itu hak pekerja tidak boleh diabaikan tanpa memberikan gaji sesuai waktu yang dijanjikan untuk memenuhi haknya sebagai pekerja. Sepanjang ia tidak menyalahi mengerjakan pekerjaan diwajibkan kepadanya, karena ia disewa sebagai pekerja, serta diberi gaji. Pekerja berhak mendapat bayaran gaji secara penuh walau terpaksa terjadi penundaan waktu pembayaran gaji. Tidak boleh dikurangi dari jumlah yang sudah diperjanjikan.⁹¹

Seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka, kecuali syarat-syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun, jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikannya dengan tidak semestinya, maka sepatutnya hal itu diperhitungkan, karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban.⁹²

Selama ia mendapatkan upah secara penuh, maka kewajibannya juga harus dipenuhi. Syekh Qaradhawi mengatakan bahwa bekerja yang baik merupakan kewajiban karyawan atas hak upah yang diperolehnya, demikian juga memberikan upah merupakan kewajiban perusahaan atas hak hasil kerja karyawan yang diperolehnya.

⁹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 391

⁹¹ *Ibid*, h. 392

⁹² *Ibid*, h. 392

3. Tenaga Yang Dicurahkan Saat Bekerja

Transaksi *ijārah* dilakukan seorang *musta'jir* dengan seorang ajir atas jasa dari tenaga yang dicurahkan, sedangkan upahnya ditentukan berdasarkan jasa yang diberikan. Adapun berapa besar tenaga yang dicurahkan bukanlah standar upah seseorang serta standar dari besarnya jasa yang diberikan. Besarnya upah akan berbeda dengan adanya perbedaan nilai jasa, bukan perbedaan jerih payah atau tenaga yang dicurahkan.⁹³

Sementara itu jerih payah (tenaga) tersebut secara mutlak tidak pernah dinilai dengan menentukan besarnya upah meskipun memang benar bahwa jasa dalam suatu pekerjaan adalah karena hasil jerih payah, namun yang diperhatikan adalah jasa (manfaat) yang diberikan bukan sekedar tenaga, meskipun tenaga tersebut tetap diperlukan.⁹⁴

Dalam transaksi *ijarah* haruslah ditetapkan tenaga yang harus dicurahkan oleh pekerja, sehingga pekerja tersebut tidak dibebani dengan pekerjaan yang berada diluar kepastiannya. Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah : 286 :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا

مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن دُسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا

⁹³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 393

⁹⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 393

بِهِ ۖ وَأَعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنْتَ مَوْلَانَا

فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٩٥﴾

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir.”⁹⁵

Karena itu, tidak diperbolehkan untuk menuntut seorang pekerja agar mencurahkan tenaganya kecuali sesuai dengan kapasitas kemampuannya yang wajar. Karena tenaga tersebut tidak mungkin dibatasi dengan takaran yang baku, membatasi jam kerja dalam sehari adalah takaran yang lebih mendekati pembatasan tersebut sehingga pembatasan jam kerja sekaligus merupakan tindakan pembatasan tenaga yang harus dilakukan oleh seorang *ajîr*.⁹⁶

⁹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV Assyifa, 2001), h. 76

⁹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 121

Syari'at Islam menganjurkan agar upah yang diterima oleh tenaga kerja, sesuai dengan tenaga yang telah diberikan. Tenaga kerja tidak boleh dirugikan, ditipu dan dieksploitasi tenaganya, karena mengingat keadaan sosial tenaga kerja pada posisi perekonomian lemah. Gaji harus dibayar atau dihargai sesuai dengan keahlian masing-masing pekerja. Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT, yaitu :

وَلِكُلِّ دَرَجَتٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا
يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.” (Q.S. Al- Ahqaf Ayat 19).⁹⁷

Dapatlah dikatakan bahwa tenaga kerja berhak menerima gaji sesuai keahlian dan kemampuannya walaupun terjadi penundaan. Penundaan yang dilakukan tidak boleh mengurangi gaji yang telah tertunda. Harus sesuai dengan yang diperjanjikan tidak boleh dikurangi sedikitpun. Ketika pada suatu saat orang yang mengupah atau yang diupah itu meninggal dunia, maka itu tidak membatalkan akad pengupahan.⁹⁸

7. Berakhirnya Upah

Para ulama *fiqh* menyatakan bahwa akad ijarah akan berakhir apabila:

⁹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : CV Assyifa, 2001), h. 456

⁹⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13* (Bandung: PT Alma'arif, 1987), h. 27

- a. Obyek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau celana yang dijahitkan hilang.
- b. Pembatalan akad
- c. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijarah* telah berakhir.
- d. Menurut jumhur ulama unsur-unsur yang boleh membatalkan akad *ijarah* itu apabila obyeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang.

C. Asas-Asas Perjanjian Menurut Islam

Asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.⁹⁹ Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya.¹⁰⁰

Mohammad Daud Ali mengartikan asas apabila dihubungkan dengan kata hukum adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.¹⁰¹ Dari definisi tersebut apabila dikaitkan dengan perjanjian dalam hukum syariah adalah, kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat tentang perjanjian terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum syari'ah.

Asas – asas hukum adalah pokok pikiran yang berpengaruh terhadap norma – norma perilaku dan yang juga menentukan

⁹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 70.

¹⁰⁰ Ibid. h. 896.

¹⁰¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cetakan ke-8. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 50-52.

lingkup keberlakuan norma – norma hukum.¹⁰² Asas-asas dapat dikatakan sebagai karakteristik akad atau ciri – ciri akad dalam hukum perjanjian islam yang membedakannya dengan akad / kontrak dalam hukum perjanjian Barat / konvensional.¹⁰³ Asas – asas akad menurut kompilasi hukum ekonomi islam terdiri dari : asas ikhtiyari / sukarela, asas amanah / menepati janji, ikhtiyati/kehati-hatian, luzum /tidak berubah,saling menguntungkan,taswiyah /kesetaraan, transparansi, asas kemampuan, asas taisir/kemudahan, asas itikad baik, asas sebab yang halal. Asas tersebut diatas dikelompokkan berdasarkan karakteristik islam terdiri dari:

1. Al-Huriyyah (Kebebasan)

Asas kebebasan berkontrak di dalam hukum Islam dibatasi oleh ketentuan syariah Islam. Dalam membuat perjanjian ini tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan¹⁰⁴.

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan tersebut mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun kebebasan ini tidak absolute. Sepanjang tidak bertentangan dengan syari'ah Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan. Menurut Faturrahman Djamil bahwa: "Syari'ah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan syarat sahnya adalah ajaran agama".¹⁰⁵

¹⁰²Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 81

¹⁰³*Ibid.* h. 85

¹⁰⁴Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018)

¹⁰⁵ Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah*" dalam Mariam Darus Badruzaman Kompilasi Hukum Perikatan. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 249

2. Al- Musawamah (Persamaan)

Dalam sebuah perjanjian, para pihak yang terlibat mempunyai kedudukan yang sama, sehingga dapat menentukan aturan dari suatu akad. Hubungan mu'amalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itu sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka antara manusia yang satu dengan yang lain, hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan. Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut. Sehingga tidak diperbolehkan membedakan manusia berdasar perbedaan warna kulit, agama, adat dan ras.

3. Al-Adalah (Keadilan)

Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian / akad menuntut para pihak yang melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian ini harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.¹⁰⁶

Asas ini merupakan lawan dari kezaliman. Salah satu bentuk kezaliman adalah mencabut hak – hak kemerdekaan orang lain, dan / atau tidak memenuhi kewajiban terhadap akad yang dibuat. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur sebagai berikut:¹⁰⁷

¹⁰⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah...*, h. 58

¹⁰⁷ Otoritas Jasa Keuangan, "SEOJK Nomor 9/SEOJK.03/2015 tentang Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah", dalam <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/SEOJK-tentang-Pedoman-Akuntansi-Perbankan-Syariah-Indonesia-bagi-Bank-Pembiayaan-Rakyat->

1. Unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba nasiah maupun riba fadl.
2. Unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan (zalim). Esensi zalim (*dzulm*) adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu tidak sesuai ukuran, kualitas dan temponya, mengambil sesuatu yang bukan haknya dan memperlakukan sesuatu tidak sesuai posisinya.
3. Unsur judi dan sikap spekulatif (*maysir*)
4. Unsur ketidakjelasan (*gharar*). Esensi gharar adalah setiap transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak karena mengandung unsur ketidakjelasan, manipulasi dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad. Bentuk – bentuk gharar antara lain:
 - a. Tidak adanya kepastian penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada.
 - b. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual
 - c. Tidak adanya kepastian kriteria kualitas dan kuantitas barang/jasa.
 - d. Tidak adanya kepastian jumlah harga yang harus dibayar dan alat pembayaran
 - e. Tidak adanya ketegasan jenis dan obyek akad
 - f. Kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditemukan dalam transaksi
 - g. Adanya unsur eksplotasi salah satu pihak karena informasi yang kurang atau dimanipulasi dan

ketidaktahuan atau ketidakpahaman yang ditransaksikan.

5. Unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait.

4. Al-Ridha (Kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi harus dilakukan dengan dasar kerelaan antara kedua pihak yang bertransaksi, tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan dan mis-statement.¹⁰⁸ Kondisi ridha ini diimplementasikan ke dalam perjanjian di antaranya dengan kesepakatan dalam bentuk sighat (ijab – qabul) dan adanya konsep khiyar (opsi).¹⁰⁹

Asas al ridha'iyah ini dalam KUH Perdata sering dinamakan asas konsensualisme atau asas konsensual. Asas ini diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Dengan kata lain, perjanjian sudah sah apabila telah tercapai kesepakatan antara dua pihak yang bertransaksi. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak, yang merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

5. Ash-Shidq (Kejujuran)

Perjanjian yang didalamnya mengandung unsur kebohongan / penipuan, sangat berpengaruh kepada keabsahan perjanjian / akad. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al Ahzab ayat 70 :

¹⁰⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah*...,h.58

¹⁰⁹ Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak*h. 100

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٧٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar,

Bahwa pihak yang berakad wajib mengatakan dengan benar dan jujur agar saling terjalin kepercayaan demi terlaksanya akad tersebut. Suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan madharat dilarang.

6. Al-Kitabah (Tertulis)

Setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. Dalam Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa “Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja.”¹¹⁰ Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan. Tentang hal ini juga tertera Dalam QS.alBaqarah (2); 282- 283, pada ayat ini dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut. Selain itu dianjurkan pula jika suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.

¹¹⁰Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal

7. Transparansi

Setiap akad dilaksanakan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.¹¹¹ Segala hal yang berkaitan dengan kontrak perjanjian hendaknya disampaikan dan disampaikan dengan apa adanya tanpa harus melebih lebihkan atau mengurangnya. Merahasiakan informasi penting yang mempunyai kaitan pada saat transaksi dapat membuat kontrak tidak sah.¹¹² Kontrak yang melibatkan gharar sangat dilarang, tujuannya adalah untuk mencegah transaksi yang mengarah pada suatu sengketa dan kurangnya kepercayaan.

Kejelasan informasi dalam masalah perjanjian merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi agar setiap pihak tidak dirugikan. Setiap pihak yang melakukan perjanjian seharusnya memiliki informasi relevan yang sama sebelum dan saat melakukan perjanjian baik informasi mengenai objek, pelaku perjanjian atau akad perjanjian. Lebih jauh lagi untuk terwujudnya transparansi, maka perlu memberi akses bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui berbagai informasi penting yang terkait dalam perjanjian.

D. Ketentuan Upah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Ketentuan Upah Menurut Hukum Islam

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Secara umum dalam ketentuan Al-Qur'an yang berkaitan dengan penentuan upah kerja ini terdapat dalam surah An-Nahl ayat : 90 :

¹¹¹*Ibid.*, pasal 53

¹¹²Ya'qub Hamzah., *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*, Cet II (Bandung : CV. Diponegoro, 1992), h. 65.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl [16] : 90).¹¹³

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah Swt memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan untuk berlaku adil dan dermawan kepada para pekerja. Kata kerabat diartikan sebagai karyawan, sebab para pekerja tersebut merupakan bagian dari perusahaan, seandainya bukan karena jerih payahnya tidak mungkin usaha majikan itu bisa berhasil. Oleh karena itu, maka kewajiban majikan adalah untuk mensejahterakan pekerjaannya, termasuk dalam hal membayar upah yang layak.

Jika dalam persyaratan perjanjian kerja ada ditentukan syarat yang telah disetujui bersama, bahwa upah pekerja dibayar sebulan sekali, maka majikan wajib memenuhi syarat tersebut yaitu membayar upah pekerja dibayar seminggu sekali, maka majikan harus memenuhi syarat tersebut yaitu membayar upah pekerja dibayar sebulan sekali. Namun jika dalam persyaratan perjanjian upah pekerja dibayarkan seminggu sekali, maka upah harus dibayarkan seminggu sekali mengikuti persyaratan perjanjian kerja yang mereka buat dan setuju bersama.¹¹⁴

Masalah penundaan pembayaran upah ada ditentukan penundaan upah adalah sah, tidaklah hal itu membatalkan dalam perjanjian yang diadakan sebelumnya. penundaan

¹¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*..., h. 415.

¹¹⁴Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*..., h. 57.

upah secara sewenang-wenang kepada pekerja dilarang dalam Islam, akan tetapi harus disegerakan. Jika dalam kesepakatan tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut.¹¹⁵

Upah berhak diterima dengan syarat-syarat:¹¹⁶

- 1) Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan
- 2) Mendapat manfaat. Jika *ijarah* dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.
- 3) Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
- 4) Mempercepat pembayaran *ijarah* sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan hal penangguhan pembayaran.

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

- 1) Ketika pekerjaan telah selesai
- 2) Jika penyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang disewakan mengalir selama penyewaan berlangsung.

Menurut Mazhab Hanafi mensyaratkan mempercepat upah dan menanggukannya sah seperti juga halnya mempercepat yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak ada kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, sekiranya dikaitkan

¹¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*..., h. 209.

¹¹⁶ *Ibid.*, h. 5.

dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya akad tersebut.¹¹⁷

2. Ketentuan Upah Menurut Hukum Positif

Upah memegang peranan yang sangat penting dan merupakan suatu ciri khas suatu hubungan kerja dan juga tujuan utama dari seorang pekerja untuk melakukan pekerjaan pada orang lain dan badan hukum ataupun perusahaan. Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada bab 10 mengatur tentang pengupahan.¹¹⁸

Menurut pasal 88 ayat (1) UU ketenagakerjaan, setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kebijakan pemerintah mengenai pengupahan yang melindungi pekerja/buruh meliputi:

- a. Upah minimum
- b. Upah kerja lembur
- c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan
- d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya
- e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya
- f. Bentuk dan cara pembayaran upah
- g. Denda dan potongan upah
- h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah
- i. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional
- j. Upah untuk pembayaran pesangon
- k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan

¹¹⁷*Ibid.*, h. 26.

¹¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pasal 89 UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa upah minimum ditetapkan pemerintah berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum dapat terdiri atas upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 89 UU Ketenagakerjaan.

Adapun dalam hal pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum yang telah ditentukan tersebut, dapat dilakukan penangguhan yang tata cara penangguhannya diatur dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

Kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika kesepakatan tersebut lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada beberapa sistem yang digunakan untuk mendistribusikan upah, dirumuskan empat sistem yang secara umum dapat diklarifikasikan sebagai berikut :

- 1) Sistem upah menurut banyaknya produksi adalah upah menurut banyaknya produksi diberikan dapat mendorong karyawan untuk bekerja lebih giat dan berproduksi lebih banyak. Produksi yang dihasilkan dapat dihargai dengan perhitungan ongkosnya. Upah sebenarnya dapat dicari dengan menggunakan standar

normal yang membandingkan kebutuhan pokok dengan hasil produksi.

- 2) Sistem upah menurut lamanya dinas adalah sistem upah semacam ini akan mendorong untuk lebih setia dan loyal terhadap perusahaan dan lembaga kerja. sistem ini sangat menguntungkan bagi yang lanjut usia dan juga orang-orang muda yang didorong untuk tetap bekerja pada suatu perusahaan.
- 3) Sistem upah menurut lamanya kerja adalah upah menurut lamanya bekerja disebut pula upah menurut waktu, misalnya bulanan. Sistem ini berdasarkan anggapan bahwa produktivitas kerja itu sama untuk waktu yang kerja yang sama, alasan-alasan yang lain adalah sistem ini menimbulkan ketentraman karena upah sudah dapat dihitung, terlepas dari kelambatan bahan untuk bekerja, kerusakan alat, sakit dan sebagainya.
- 4) Sistem upah menurut kebutuhan adalah upah yang diberikan menurut besarnya kebutuhan karyawan beserta keluarganya disebut upah menurut kebutuhan. Seandainya semua kebutuhan itu dipenuhi, maka upah itu akan mempersamakan standar hidup semua orang.

Salah satu kelemahan dari sistem ini adalah kurang mendorong inisiatif kerja, sehingga sama halnya dengan sistem upah menurut lamanya kerja dan lamanya dinas. Kebaikan akan memberikan rasa aman karena nasib karyawan ditanggung oleh perusahaan.

Didalam memberikan upah/gaji perlu juga memperhatikan prinsip keadilan. Keadilan bukan berarti bahwa segala sesuatu mesti dibagi sama rata. Keadilan harus dihubungkan antara pengorbanan dengan penghasilan. Semakin tinggi pengorbanan semakin tinggi penghasilan yang diharapkan. Karena itu pertama yang harus dinilai adalah pengorbanan yang diperlukan oleh suatu jabatan, pengorbanan dari suatu jabatan dipertunjukkan dari

persyaratan-persyaratan (spesifikasi) yang harus dipenuhi oleh orang yang memangku jabatan tersebut. Semakin tinggi persyaratan yang diperlukan, semakin tinggi pula penghasilan yang diharapkan. Penghasilan ini ditunjukan dari upah yang diterima.

Rasa keadilan ini sangat diperhatikan oleh para karyawan, mereka tidak hanya memperhatikan besarnya uang yang dibawa pulang, tetapi juga membandingkan dengan rekan yang lain. Disamping masalah keadilan, maka dalam pengupahan perlu diperhatikan unsur kelayakan. Kelayakan ini bisa dibandingkan dengan pengupahan pada perusahaan-perusahaan lain, atau bisa juga dengan menggunakan peraturan pemerintah tentang upah minimum atau juga dengan menggunakan kebutuhan pokok minimum.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Dapartenmen Agama RI, *Al-Quraan Dan Terjemahnya*, Bandung: PT Diponogoro, 2014.

Hadist

Ibnu Rusyd, *Bidayah Al Mujtahit Juz 2*, Semarang :Maktabah Usaha Keluarga, tt.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Pesan, Kesan, Dan Keserasian AL-Quran), Jakarta: Lentera Hati, Cet.II, 2009.

Usman AL-Qurtuby, *AL-Quran Cordoba*, Bandung : Cordoba Internasional, 2016.

WahabAz-Zuhaili, *Alfiqh Al-Islami WaAdilatuhu, Jilid IV*, Beirut: Dar Al Fikr, 1984.

Buku

Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Fiqih Islam lengkap*, Jakarta :PT. Rineka Cipta, 2005.

Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018.

Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2009.

Abdullah AL-Mushlih Dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta : Darul Haq, 2008.

Al-Faruz Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid 2*, Penerbit Dana Bakti Wakaf, 1989.

Chairuman Pasaibu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2004.

Chairuman Pasaribu Dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta :Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, 2004.

F.Winarni Dan G. Sugiyarso, *Administrasi Gaji Dan Upah*, Yogyakarta:Pustaka Widyatama, 2006.

Gurfan A. Mas"Adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

H Abd.Rahman Dahlan, M.A., *Ushul Fiqh* Cetakan Pertama 2010.

Hasan Syadily, *Ensiklopedia Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru,1984.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Hendra Poerwanto, *SistemUpah Dan Perencanaan Tingkat Upah* Jakarta Grafika, 1994.

Khumedi Ja'Far, *Hukum Perdata Islamdi Indonesia (Aspek Hukum Kelluarga Dan bisnis)*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fikih Muamalat)*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003.

Mo Nazir, *Metode Penelitian* Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.

Mo Saefulloh, *Fikih Islam lengkap*, Surabaya: Terbit Islam terang 2005.

Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta :Gema Insani Press, 2001.

Mulyadi Subri, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Mulyadi, *Sistem Informasi Akutansi*, Jakarta:Salemba Empat, 2016.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muammalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet, I , 2000.

Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relation Dan Komunikasi* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Siti Mahmudah, *Historisitas Syariah Kritik Relasi Khalid ‘AbdAl-Karim Yogyakarta*: Lkis Pelangi Aksara, 2016.

Sofian Assuri, *Manajemen Pemasaran Dasar Konsep Dan Strategi*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1987.

Sohari Sahari, *Fiqh Muamalat*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methodes* Bandung: Alfabeta, 2017

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Syarief Darmayo &Rianto Adi, *Trafiking Anak Untuk Pekerja Rumah Tangga*, Jakarta, 2000.

Taqyudin An,Nabhan, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya; Risalah Gusti, 1960.

Ya’qub Hamzah.,*Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*, Cet II Bandung : CV. Diponegoro, 1992.

Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*, Jakarta: Kencana, 2018

Jurnal

Abdul Qodir Jaelani, “Bunga Bank Dalam Perspektif Sosio-Ekonomi Dan Ushul Fiqh (Studi Atas Pemikiran M. Umer Chapra)”, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), Vol. 4, No. 2, (2012).

Abdur Rohman, *Analisis Penerapan Akad Ju’alah Dalam Multi Level Marketing*, (Al Adalah Vol.XIII.No.2, Desember 2016).

Abdur Rohman, *Analisis Penerapan Akad Ju’alah Dalam Multi Level Marketing*, (Al Adalah Vol. XIII. No. 2, Desember 2016), 180 (On-Line) Tersedia Di:
<https://doi.org/10.24042/Adalah13i2.1856>

Eka Nuraini, Ab Mumin bin Ab Ghani, Akad Penerbitan Sukuk Di Pasar Modal Indonesia dalam Perspektif Fikih, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 14 No. 1, 2017.

M. Harir Muzaki, Ahmad Sumanto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan, *Journal Al-Adalah*, Vol. 14, No. 2, 2017.

Mursa, “Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan” dalam Perspektif Ekonomi Darussalam (Sumatera Barat: Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat), Vol. 1 No. 1 (Maret 2015).

Sumber Online

Otoritas Jasa Keuangan, “SEOJK Nomor 9/SEOJK.03/2015 tentang Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”, dalam [https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/SEOJK-tentang-Pedoman-Akuntansi-Perbankan-Syariah-Indonesia-bagi-Bank-Pembiayaan-Rakyat-Syariah-PAPSI%20BPRS%20%201%20Pendahuluan%20\(3-11\).pdf](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/SEOJK-tentang-Pedoman-Akuntansi-Perbankan-Syariah-Indonesia-bagi-Bank-Pembiayaan-Rakyat-Syariah-PAPSI%20BPRS%20%201%20Pendahuluan%20(3-11).pdf), diakses tanggal 28 Desember 2020

Skripsi Dewi Lestari ” Sitem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Koroweleng Cepiring-Kendal). Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2019.

Skripsi Deni Susanto, Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemotongan Gaji Karyawan Akibat Hilangnya Barang Perusahaan (studi pada Indomaret Fajar Bulan Lampung Barat)” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, 2017.

Skripsi Noermalia “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemotongan Upah Untuk Asuransi Syariah Dan BPJS Kesehatan Karyawan Swasta PT Kent Trasindo Indonesia Surabaya”. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Skripsi, Lia Resti Carlina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawan Berdasarkan Persentase Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi di SPA dan Salon Muslimah Az-Zarah di Bandar Lampung). Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, 2019.

Wawancara

Ayu, PRT Yayasan Tunas Karya Unit , Wawancara, Desa tegal Mukti, 25 Desember 2021, Pukul 13.15 Wib.

Bapak Wanto Revan, Staff Pekerja Lapangan, Wawancara, Kantor Yayasan Tunas Karya Unit 1, 23 Desember 2021, Pukul 11.00 Wib.

Dina, Calon PRT Yayasan Tunas Karya Unit , Wawancara, Desa tegal Mukti, 26 Desember 2021, Pukul 11.15 Wib.

Ibu Darmi, Mantan PRT Yayasan Tunas Karya Unit , Wawancara, Desa tegal Mukti, 25 Desember 2021, Pukul 11.15 Wib.